



PENGARUH PENGETAHUAN DAN EKSPEKTASI MASYARAKAT TERHADAP KESENJANGAN PERSEPSI AUDIT PEMERINTAHAN

Rizqi Ramadhony, P. Basuki Hadiprajitno¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

Audit perception gap revealed a discrepancy between public perception as financial statements user and public auditor. People have a very broad perception of public auditor responsibilities. Public perception which influenced by various factors such as knowledge and expectations. This research aimed to examine whether or not there is a significant influence from public knowledge and expectation of public auditor duties and responsibilities on audit perception gap. Population in this research was public in general as users of financial statements with the sample were employees on public institutions and academics. This research was used purposive sampling and questionnaire was used as a method in collecting data, and then analyzed by using logistic regression. The results of this research shows that public knowledge of public auditor responsibilities as regulatory and professional bodies pronouncement and public expectation on public auditor to perform unreasonable responsibilities had significant influence on perception gap existence.

Keywords: audit perception gap, auditor, duties and responsibilities, public knowledge, public expectation

PENDAHULUAN

Masyarakat belum sepenuhnya memahami makna sebenarnya dari fungsi attestasi terutama dalam konteks opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Mereka percaya bahwa opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit bebas dari kesalahan. Masyarakat merasa bahwa auditor seharusnya tidak hanya memberikan opini, namun juga menginterpretasikan laporan keuangan sehingga membuat pengguna dapat lebih mudah mengambil keputusan (Okafor dan Otor, 2012). Hal inilah yang menciptakan terjadinya kesenjangan persepsi audit (*audit perception gap*) antara auditor dengan pemakai laporan keuangan. Selain itu pemakai laporan keuangan juga meletakkan tanggung jawab untuk mendekatkan jarak antara kedua persepsi tersebut kepada auditor.

Meningkatnya isu praktik tindak pidana korupsi (tipikor) semakin meningkatkan sikap skeptis masyarakat akan laporan keuangan pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas dan pengawasan yang andal terhadap pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat. Pada akhirnya, tuntutan terhadap profesi auditor eksternal dalam hal ini BPK RI semakin tinggi untuk dapat meningkatkan kinerjanya secara profesional agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat dipertanggungjawabkan. BPK RI diharapkan mampu memberikan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh pemerintah dalam laporan keuangan. Hal tersebut

¹Corresponding author

yang secara tidak langsung menjadi penyebab semakin tingginya kesenjangan persepsi mengenai pekerjaan audit.

Guy dan Sullivan (1988) mengemukakan bahwa masyarakat dan pemakai laporan keuangan mempunyai ekspektasi tinggi terhadap peran dan tanggung jawab auditor untuk mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat mengenai proses auditnya terhadap pemakai laporan keuangan dan juga mengkomunikasikan secara jelas dengan komite audit serta pihak-pihak lain yang berkepentingan atau bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan yang dapat dipercaya.

Telah banyak variabel yang digunakan oleh para peneliti untuk merumuskan fenomena terjadinya kesenjangan persepsi audit. Mereka juga berusaha untuk mencari jalan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan terjadinya kesenjangan persepsi audit. Hal utama yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan persepsi audit adalah karena adanya perbedaan persepsi atau pemahaman antara auditor dengan pengguna laporan dalam berbagai faktor seperti tugas dan tanggung jawab auditor, proses audit, dan lainnya. Oleh karena itu penelitian mengenai kesenjangan persepsi audit perlu terus dikembangkan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkannya, agar masyarakat dapat menggunakan laporan keuangan dan laporan hasil audit sesuai kepentingan dan kebutuhannya. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mendapatkan bukti empiris dan menganalisis pengaruh pengetahuan masyarakat dan ekspektasi masyarakat terhadap terjadinya kesenjangan persepsi audit.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agen, untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal dan dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Secara umum teori agensi adalah hubungan kontraktual antara dua individu, yaitu prinsipal dan agennya yang diwujudkan dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan manfaat secara keseluruhan.

Messier, dkk., (2008) mengungkapkan bahwa hubungan keagenan mengakibatkan dua permasalahan yaitu: (1) hubungan antara pemilik dan manajemen sering berakhir pada terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*); dan (2) adanya tujuan antara pemilik dan manajemen yang mungkin tidak sama, maka wajar saja jika terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*). Guy dan Sullivan (1988) mengemukakan bahwa masyarakat dan pemakai laporan keuangan mempunyai ekspektasi tinggi terhadap peran dan tanggung jawab auditor untuk mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat mengenai proses auditnya terhadap pemakai laporan keuangan dan juga mengkomunikasikan secara jelas dengan komite audit serta pihak-pihak lain yang berkepentingan atau bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan yang dapat dipercaya. Dalam kenyataannya auditor sulit memenuhi ekspektasi tersebut, karena berbagai hambatan yang ada baik secara institusional maupun kultur organisasi.

Teori agensi dalam konteks kesenjangan persepsi audit dapat terlihat dari masyarakat yang berperan sebagai prinsipal dan pemerintah berperan sebagai agennya. Untuk menghindari terjadinya permasalahan keagenan, maka diperlukan pihak ketiga yang independen, yaitu auditor pemerintah (dalam hal ini BPK RI), untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Akan tetapi masyarakat memiliki persepsi dan harapan sendiri atas tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh auditor pemerintah yang sebenarnya telah diatur dalam undang-undang dan

peraturan-peraturan lainnya. Persepsi yang timbul dalam masyarakat bisa saja diakibatkan oleh berbagai macam faktor. Beberapa faktor seperti tingkat pengetahuan dan harapan di dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya persepsi yang berbeda-beda. Persepsi masyarakat mengenai tanggung jawab auditor yang berbeda dengan pernyataan hukum dan badan profesional menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kesenjangan persepsi audit.

Persepsi

Persepsi, secara etimologi berasal dari bahasa latin (*perceptio*) yang berarti menerima, sedangkan dalam pengertian secara terminologi adalah upaya memasukkan hal-hal ke dalam kesadaran kita sehingga kita dapat meramalkan atau mengidentifikasi berbagai objek-objek di dunia luar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Robbins dan Judge (2013) mendefinisikan persepsi sebagai sebuah proses dimana seorang individu mengelola dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka untuk memberikan arti dalam lingkungan mereka. Sedangkan Hellriegel dan Slocum, Jr (2011) mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana seorang individu memilih, mengelola, menginterpretasikan, dan menanggapi informasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum persepsi adalah proses dimana seseorang mengelola dan menginterpretasikan suatu informasi melalui panca inderanya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga dapat memberikan tanggapan atas informasi tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Hellriegel dan Slocum, Jr (2011) dibagi menjadi dua, yaitu: (1) faktor eksternal yang terdiri dari ukuran, intensitas, perbedaan, gerakan, pengulangan, dan sesuatu yang baru serta kebiasaan, (2) faktor internal yang terdiri dari kepribadian, pembelajaran, dan motivasi. Sedangkan Robbins dan Judge (2013) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menjadi tiga, yaitu (1) faktor dari dalam diri pembuat persepsi (internal) yang terdiri dari sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan, (2) faktor dari target dipersepsikan (eksternal) yang terdiri dari sesuatu yang baru, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kemiripan, (3) faktor situasional (konteks) yang terdiri dari waktu, keadaan kerja, dan keadaan sosial.

Persepsi yang timbul dalam masyarakat bisa saja diakibatkan oleh berbagai macam faktor. Beberapa faktor seperti tingkat pengetahuan dan harapan di dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya persepsi yang berbeda-beda. Persepsi masyarakat mengenai tanggung jawab auditor yang berbeda dengan pernyataan hukum dan badan profesional menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kesenjangan persepsi audit.

Kesenjangan Persepsi Audit (Audit Perception Gap)

Liggio (1974) adalah orang pertama yang memperkenalkan istilah "kesenjangan" pada literatur audit, dia mendefinisikannya sebagai perbedaan antara tingkat kinerja yang diharapkan seperti yang dipahami oleh akuntan independen dengan pengguna laporan keuangan (Okafor dan Otor, 2012). Pada tahun 1978, definisi diperluas oleh *Commission on Auditor Responsibilities* yang meneliti apakah ada kesenjangan antara apa yang diharapkan atau dibutuhkan oleh dan apa yang auditor bisa dan sewajarnya untuk dicapai (Porter dan Gowthorpe, 2004). Kesenjangan persepsi audit juga telah didefinisikan sebagai perbedaan keyakinan antara auditor dan masyarakat tentang tugas dan tanggung jawab yang ditanggung oleh auditor dan pesan yang disampaikan dalam laporan audit dan perbedaan antara apa yang diharapkan publik dari profesi audit dan apa sebenarnya disediakan (Monroe dan Woodliff, 1993; Jennings, Reckers dan Kneer, 1993 dalam Okafor dan Otor, 2012). Liggio (1974) dalam Porter (1993) mengamati bahwa definisi-definisi

ini tidak mencakup gagasan bahwa auditor mungkin tidak dapat mencapai kinerja yang diharapkan atau apa yang mereka bisa dan selanjutnya harus bisa.

Definisi-definisi mengenai kesenjangan persepsi audit jika disimpulkan secara umum adalah merupakan perbedaan persepsi antara auditor dengan masyarakat atau pengguna laporan keuangan mengenai berbagai faktor yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan audit. Beberapa diantaranya adalah perbedaan persepsi mengenai tingkat kinerja, tugas dan tanggung jawab, peran, kompetensi, independensi, komunikasi, dan berbagai hal lainnya. Namun yang perlu ditekankan dalam kesenjangan persepsi audit adalah adanya harapan masyarakat atau para pemakai laporan keuangan terhadap auditor tentang laporan keuangan secara nyata melebihi peran auditor dan opini auditnya.

Porter (1993) mengemukakan bahwa kesenjangan persepsi audit yang terjadi terdiri atas dua komponen utama, yaitu:

1. Kesenjangan kelayakan (*reasonableness gap*), yaitu kesenjangan antara apa yang publik harapkan dari auditor untuk dicapai dan apa yang auditor selanjutnya diharapkan untuk dicapai.
2. Kesenjangan hasil kinerja (*performance gap*), yaitu kesenjangan antara apa yang selanjutnya publik dapat harapkan dari auditor untuk dicapai dan apa yang auditor pahami untuk dicapai, yang dibagi menjadi:
 - a. Kekurangan standar (*deficient standard gap*), di mana terdapat perbedaan antara ekspektasi publik dengan definisi undang-undang, peraturan, dan badan profesional mengenai tanggung jawab auditor.
 - b. Kekurangan kinerja (*deficient performance gap*), di mana kinerja auditor berbeda dengan yang diharapkan dan dipahami oleh publik.

Publik dan pemakai laporan keuangan mempunyai ekspektasi tinggi terhadap peran dan tanggung jawab auditor untuk mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat mengenai proses auditnya terhadap pemakai laporan keuangan. Selain itu perbedaan pengetahuan yang dimiliki antara auditor dengan pemakai laporan keuangan juga menjadi penyebab adanya kesenjangan persepsi.

Pengetahuan Masyarakat

Pengetahuan menurut Notoatmodjo (2007) adalah merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia melalui penglihatan dan pendengaran. Pengetahuan seseorang terhadap suatu obyek dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, pengalaman, dan tinggi rendahnya informasi tentang obyek tersebut dilingkungannya. Dengan demikian pengetahuan itu dapat diperoleh dari pengalaman dan informasi-informasi yang diterima setiap hari, baik dari mendengar maupun melihat tanpa harus belajar melalui jalur pendidikan formal.

Pengetahuan masyarakat dalam penelitian ini diartikan sebagai tingkat pengetahuan masyarakat mengenai tanggung jawab auditor sebagaimana yang dinyatakan dalam hukum, peraturan perundang-undangan, dan pernyataan badan profesional. Penelitian yang dilakukan oleh Okafor dan Otarlol (2012) menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat merupakan penyebab terjadinya kesenjangan persepsi audit. Berdasarkan teori dan penelitian yang sudah ada tersebut, penelitian ini mengasumsikan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat yang diprosikan dengan semakin rendahnya tingkat pengetahuan seseorang terhadap tanggung jawab auditor akan membuat tingkat kesenjangan persepsi audit semakin tinggi. Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : *Pengetahuan masyarakat mengenai tanggung jawab auditor pemerintah sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan dan pernyataan badan profesional berpengaruh terhadap terjadinya kesenjangan persepsi audit*

Ekspektasi Masyarakat

Ekspektasi, secara etimologi berasal dari bahasa Inggris *expectation* yang berarti sebuah harapan/pengharapan atas apa yang paling mungkin terjadi, yang merupakan kepercayaan yang berpusat pada masa depan, realistis atau mungkin tidak realistis. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), ekspektasi adalah sesuatu yang diharapkan dengan keinginan agar dapat menjadi kenyataan. Robbins dan Judge (2013) menjelaskan bahwa ekspektasi kinerja seseorang dapat membuat orang tersebut membenarkan persepsi mereka walaupun pada kenyataannya persepsi tersebut salah. Ekspektasi atas beberapa interpretasi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu seseorang dengan objek yang sama atau mirip. Sehingga seseorang cenderung berusaha untuk memenuhi ekspektasi yang dimilikinya dengan melakukan berbagai cara agar menjadi kenyataan.

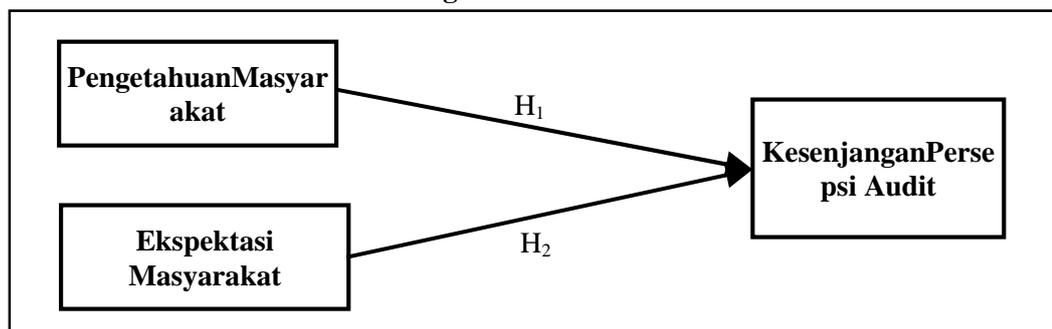
Ekspektasi masyarakat dalam penelitian ini diartikan sebagai ekspektasi/harapan masyarakat terhadap tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh auditor. Ekspektasi tersebut cenderung melebihi dari apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Okafor dan Otalor (2012) menunjukkan bahwa ekspektasi masyarakat yang tidak wajar merupakan penyebab terjadinya kesenjangan persepsi audit. Berdasarkan teori dan penelitian yang sudah ada tersebut, penelitian ini mengasumsikan bahwa semakin tidak wajarnya ekspektasi masyarakat terhadap tanggung jawab auditor akan membuat tingkat kesenjangan persepsi audit semakin tinggi. Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : *Ekspektasi masyarakat kepada auditor pemerintah untuk melakukan tanggung jawab yang tidak wajar berpengaruh terhadap terjadinya kesenjangan persepsi audit*

Model Penelitian

Berdasarkan berbagai teori yang telah dikemukakan dan pendalaman masalah yang ada, model penelitian yang dikembangkan berdasarkan pada teori perilaku dalam model faktor-faktor penyebab persepsi yang dikemukakan oleh Robbins dan Judge (2013), mengenai pengaruh pengetahuan dan ekspektasi masyarakat mengenai tanggung jawab auditor pemerintah terhadap kesenjangan persepsi audit, dapat digambarkan dalam suatu skema kerangka pemikiran seperti berikut ini:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada definisi operasional yang disusun oleh Okafor dan Otalor (2013) dan kemudian dikembangkan dengan didasarkan pada

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pengukuran variabel dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengetahuan Masyarakat

Pengetahuan masyarakat dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat mengenai tanggung jawab auditor pemerintah. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat mengenai tanggung jawab auditor pemerintah, penelitian ini menggunakan 10 indikator pertanyaan. Pengukuran terhadap indikator pertanyaan menggunakan skala likert empat tingkat, yang merupakan skala tingkat kesetujuan terhadap pertanyaan yang menjadi indikator dengan rentang skala 1-4.

2. Ekspektasi Masyarakat

Ekspektasi masyarakat dalam penelitian menggambarkan mengenai ekspektasi/harapan masyarakat terhadap tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh auditor. Untuk mengetahui ekspektasi masyarakat mengenai tanggung jawab auditor pemerintah, maka penelitian ini menggunakan 10 indikator pertanyaan. Pengukuran terhadap indikator pertanyaan dilakukan dengan menggunakan skala likert empat tingkat, yang merupakan skala tingkat kesetujuan terhadap pertanyaan yang menjadi indikator dengan rentang skala 1-4.

3. Kesenjangan persepsi audit

Variabel kesenjangan persepsi audit dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana persepsi masyarakat mengenai tanggung jawab auditor pemerintah, apakah terdapat perbedaan atau tidak dengan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kesenjangan persepsi audit, penelitian ini menggunakan 7 indikator pertanyaan. Pengukuran terhadap indikator pertanyaan dilakukan dengan menggunakan skala likert empat tingkat, yang merupakan skala tingkat kesetujuan terhadap pertanyaan yang menjadi indikator dengan rentang skala 1-4. Selanjutnya berdasarkan total skor yang ada akan ditransformasikan menjadi variabel dummy, yaitu 1 (ada) dan 0 (tidak ada). Apabila total skor berada di atas nilai rata-rata maka akan diberikan nilai 1 dan apabila berada di bawah nilai rata-rata akan diberikan nilai 0.

Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat umum pengguna laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Populasi ini termasuk dalam populasi besar atau tidak terbatas karena jumlah pastinya sulit untuk ditentukan. Menurut Eriyanto (2007) dalam populasi besar (tidak diketahui), ukuran populasi sama sekali tidak menjadi dasar dalam penentuan besar sampel. Besar kecil sampel hanya ditentukan oleh tiga faktor yaitu tingkat kepercayaan, sampling error, dan proporsi populasi. Oleh karena itu untuk menentukan jumlah minimal sampel yang akan diambil penelitian ini menggunakan rumus berikut ini:

$$n = \frac{Z^2 \cdot p(1-p)}{E^2}$$

Dimana:

- n : Jumlah sampel yang akan diambil,
- Z : Tingkat kepercayaan yang akan digunakan,
- p(1 - p) : variasi populasi, dan
- E : kesalahan sampel yang dapat diterima

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel minimum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$n = [1,96^2 \times 0,5 (1 - 0,5)]/0,1^2 = 96,04 \quad 96 \text{ sampel}$$

Total jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 145 sampel.

Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampling berdasarkan kriteria-kriteria dan tujuan tertentu. Kriteria yang digunakan adalah responden yang memiliki latar belakang dalam lingkup audit pemerintahan baik sebagai praktisi maupun akademisi sehingga diharapkan memiliki pemahaman yang cukup mengenai tugas dan tanggung jawab auditor pemerintah

Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariat dengan menggunakan regresilogistik (*logistic regression*) sebagai berikut:

$$\text{Ln} \frac{APG}{1-APG} = \alpha + \beta_1 PM + \beta_2 EM$$

Keterangan:

- = Konstanta
- $\text{Ln} \frac{APG}{1-APG}$ = Variabel Dummy, kategori 1 untuk ada kesenjangan persepsi audit (*Audit Perception Gap-APG*) dan kategori 0 untuk tidak ada kesenjangan persepsi audit
- PM = Pengetahuan Masyarakat
- EM = Ekspektasi Masyarakat
- i = Koefisien Regresi, di mana $i = 1$ dan 2

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pengguna laporan yang dihasilkan oleh BPK RI. Pengguna laporan hasil pemeriksaan tersebut diprosikan melalui pemerintah dan masyarakat umum. Pemerintah dalam penelitian ini adalah para pegawai negeri sipil, baik di pusat maupun di daerah, sebagai pengguna dari laporan yang dihasilkan oleh BPK RI. Sedangkan masyarakat umum diprosikan lagi melalui akademisi, yaitu dosen dan mahasiswa.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada responden baik secara langsung, melalui jasa pengiriman, atau melalui media online. Jumlah kuesioner yang disebar dalam penelitian ini adalah sebanyak 300 kuesioner. Kuesioner yang kembali dari 300 lembar kuesioner yang telah disebar oleh peneliti adalah sebanyak 151 kuesioner. Dari kuesioner yang kembali tersebut yang dapat diolah dalam penelitian ini hanya hanya 145 kuesioner. Sisanya sebanyak 6 kuesioner tidak digunakan karena pengisiannya tidak lengkap. Jumlah kuesioner yang dapat digunakan sebanyak 145 kuesioner telah memenuhi kriteria sampel minimum penelitian, yaitu sebanyak 100 sampel Ringkasan pembagian dan pengembalian kuesioner, jumlah responden berdasarkan pendidikan, dan jumlah responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel-tabelberikut ini:

Tabel 1
Distribusi Kuesioner Penelitian

Responden	Disebar	Kembali	Persentase Kembali	Gugur	Dipakai
Pemerintah Daerah - Sumatera Utara	50	37	74 %	0	37

- DKI Jakarta	15	5	33 %	1	4
- Jawa Barat	15	0	0 %	0	0
- Kalimantan Timur	15	6	40 %	0	6
- Sulawesi Selatan	15	5	33 %	0	5
- Maluku Utara	15	0	0 %	0	0
Pemerintah Pusat	100	57	57 %	5	52
Akademisi	75	41	55 %	0	41
Jumlah	300	151	50 %	6	145

Sumber: Data primer yang diolah, 2014

Tabel 2
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMU/Sederajat	28	19,31 %
D1/D2	0	0,00 %
D3	17	11,72 %
S1	81	55,86 %
S2	19	13,10 %
S3	0	0,00 %
Total	145	100,00 %

Sumber: Data primer yang diolah, 2014

Tabel 3
Profil Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
PNS Pusat	52	35,86%
PNS Daerah	49	33,79%
Dosen	9	6,21%
Mahasiswa	32	22,07%
Lainnya	3	2,07%
Total	145	100,00 %

Sumber: Data primer yang diolah, 2014

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini didominasi oleh kelompok responden dengan latar belakang pendidikan S1.dengan tingkat prosentase sebesar 55,86%. Selain itu sebagian besar responden dalam penelitian ini bekerja sebagai PNS di Pusat dengan prosentase sebesar 35,86%.

Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif atas variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Teoritis		Sesungguhnya		Std. Dev
	Kisaran	Mean	Kisaran	Mean	
PM	10-40	25	13-40	28,93	5,816
EM	10-40	25	22-40	30,90	4,666

Sumber: Data primer yang diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 4 di atas, variabel pengetahuan masyarakat (PM) mempunyai bobot kisaran teoritis sebesar 10 sampai 40 dengan nilai rata-rata sebesar 25. Sedangkan pada kisaran sesungguhnya, variabel ini mempunyai bobot kisaran sesungguhnya sebesar 13 sampai 40 dengan nilai rata-rata 28,93 dan standar deviasi sebesar 5,816. Nilai rata-rata jawaban variabel pengetahuan

masyarakat untuk kisaran sesungguhnya di atas nilai rata-rata kisaran teoritis. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penilaian responden terhadap variabel pengetahuan masyarakat berada pada level kuat. Selain itu, standar deviasi yang relatif rendah yaitu sebesar 5,816 menunjukkan bahwa variasi jawaban yang diberikan responden untuk pengukuran variabel ini relatif kecil.

Variabel ekspektasi masyarakat (EM) mempunyai bobot kisaran teoritis sebesar 10 sampai 40 dengan nilai rata-rata sebesar 25. Sedangkan pada kisaran sesungguhnya, variabel ekspektasi masyarakat ini mempunyai bobot kisaran sesungguhnya sebesar 22 sampai 40 dengan nilai rata-rata 30,90 dan standar deviasi sebesar 4,666. Nilai rata-rata jawaban variabel ekspektasi masyarakat untuk kisaran sesungguhnya di atas nilai rata-rata kisaran teoritis. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penilaian responden terhadap variabel ekspektasi masyarakat berada pada level kuat. Selain itu, standar deviasi yang relatif rendah yaitu sebesar 4,666 menunjukkan bahwa variasi jawaban yang diberikan responden untuk pengukuran variabel ini relatif kecil.

Variabel kesenjangan ekspektasi audit (AEG) tidak dilakukan analisis deskriptif karena dalam variabel tersebut merupakan variabel kategorikal yang menggunakan variabel dummy (1 atau 0) untuk pengukurannya. Nilai yang terdapat pada variabel dummy hanya berfungsi sebagai label kategori semata tanpa nilai intrinsik. Oleh karena itu, variabel kesenjangan ekspektasi audit tidak dapat dianalisis minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasinya.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penilaian kelayakan data empiris cocok dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data) dilakukan dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Hasil dari pengujian *Hosmer and Lemeshow's* menunjukkan nilai *Chi Square* tabel untuk df 8 pada taraf signifikansi 0,05 adalah sebesar 15,5073 sehingga *Chi Square* hitung lebih kecil daripada *Chi Square* tabel ($4,757 < 15,5073$). Selain itu nilai signifikansi adalah sebesar 0,783 atau lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

Selanjutnya adalah menentukan model regresi yang terbentuk dari pengujian atas ketiga variabel yang diteliti, hasil pengujian atas ketiga variabel tersebut dapat dijelaskan dalam Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Hasil Pengujian Variabel

	B	S.E.	Wald	Df	p	Odds Ratio
PM	-0,380	0,098	15,108	1	0,000	0,684
EM	0,598	0,162	13,684	1	0,000	1,818
Constant	-6,187	4,860	1,621	1	0,203	0,002

Sumber: Data primer yang diolah, 2014

Model regresi yang terbentuk dari hasil analisis tersebut diatas adalah sebagai berikut:

$$\text{Ln} \frac{APG}{1-APG} = -6,187 - 0,380 \text{ PM} + 0,598 \text{ EM}$$

Dari persamaan regresi yang terbentuk, didapat nilai koefisien konstanta -6,187 yang menunjukkan bahwa apabila tidak ada nilai variabel lainnya maka nilai kesenjangan persepsi audit yang terbentuk adalah sebesar -6,187. Tetapi nilai konstanta ini tidak signifikan secara statistik. Hal ini berarti bahwa tidak semua kesenjangan persepsi audit bernilai -6,187 pada saat faktor lainnya bernilai nol. Koefisien pengetahuan masyarakat sebesar -0,380 menunjukkan bahwa apabila terdapat peningkatan variabel pengetahuan masyarakat maka akan menurunkan nilai kesenjangan persepsi audit sebanyak 0,380 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien ekspektasi masyarakat sebesar 0,598 menunjukkan bahwa apabila terdapat peningkatan variabel

ekspektasi masyarakat maka akan meningkatkan kesenjangan persepsi audit sebanyak 0,598 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Interprestasi Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian regresi logistik dilakukan untuk menguji pengaruh dari pengetahuan masyarakat dan ekspektasi masyarakat yang responden berikan terhadap terjadinya kesenjangan persepsi audit. Model regresi logistik yang dihasilkan menunjukkan bahwa variabel prediktor keduanya signifikan secara statistik. Selain itu model regresi logistik secara keseluruhan dapat menjelaskan 79,2% (*Nagelkerke R Squared*) atas varian dalam kesenjangan persepsi audit, serta mengklasifikasikan secara tepat 92,4% dari seluruh kasus yang ada. Variabel prediktor yang lebih baik dalam menjelaskan variabel dependen adalah ekspektasi masyarakat dengan tingkat probabilitas (*odds ratio*) sebesar 1,818. Hal ini mengindikasikan bahwa responden dengan ekspektasi tinggi, akan menyebabkan hampir dua kali terjadinya kesenjangan persepsi audit daripada responden dengan ekspektasi rendah.

Berdasarkan model regresi logistik yang terbentuk dari pengujian statistik, diketahui bahwa kedua hipotesis dalam penelitian ini diterima. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hasil uji hipotesis.

H1 : Hasil pengujian atas hipotesis pertama menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai tanggung jawab auditor sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan dan pernyataan badan profesional memiliki pengaruh yang *signifikan* dan *negatif* terhadap terjadinya kesenjangan persepsi audit. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan masyarakat yang masih kurang mengenai tanggung jawab auditor sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan akan meningkatkan terjadinya kesenjangan persepsi audit. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Okafor dan Otalor (2012) dimana tingkat pengetahuan masyarakat yang masih kurang mengenai tanggung jawab audit merupakan penyebab terjadinya kesenjangan persepsi audit. Selain itu hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan teori persepsi yang menyatakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah pengalaman dan latar belakang.

H2 : Hasil pengujian atas hipotesis kedua ini menunjukkan bahwa ekspektasi masyarakat kepada auditor pemerintah untuk melakukan tanggung jawab yang tidak wajar memiliki pengaruh *signifikan* dan *positif* terhadap terjadinya kesenjangan persepsi audit. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila ekspektasi masyarakat yang tidak wajar kepada auditor semakin tinggi akan meningkatkan terjadinya kesenjangan persepsi audit. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Okafor dan Otalor (2012) dimana ekspektasi masyarakat yang tidak wajar kepada auditor merupakan penyebab terjadinya kesenjangan persepsi audit. Selain itu hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan teori persepsi yang menyatakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah harapan atau ekspektasi. Masyarakat memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap kinerja auditor untuk dapat mengungkapkan hal-hal yang tidak wajar, antara lain untuk mengungkapkan semua kecurangan yang terjadi walaupun tidak material atau untuk memeriksa seluruh transaksi yang dilakukan oleh auditee.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pengetahuan masyarakat dan ekspektasi masyarakat terhadap kesenjangan persepsi audit. Pengetahuan masyarakat mempunyai pengaruh yang negatif terhadap terjadinya kesenjangan persepsi audit. Beberapa responden bahkan menjawab pertanyaan mengenai tanggung jawab untuk

menyusun laporan keuangan adalah merupakan tanggung jawab auditor. Rendahnya tingkat pengetahuan ini memberi kesan bahwa masyarakat tidak peduli dengan pekerjaan yang dilakukan oleh auditor pemerintah. Semakin rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai tanggung jawab auditor pemerintah akan membuat kesenjangan persepsi audit semakin tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai tanggung jawab auditor sehingga dapat mengurangi terjadinya kesenjangan persepsi audit.

Ekspektasi masyarakat kepada auditor untuk melakukan tanggung jawab yang tidak wajar (tidak masuk akal) mempunyai pengaruh yang positif terhadap terjadinya kesenjangan persepsi audit. Harapan yang terlalu tinggi terhadap pekerjaan audit mengakibatkan adanya ekspektasi yang tidak wajar. Sebagian besar responden mengharapkan auditor untuk memastikan tidak adanya kecurangan yang terjadi dan memeriksa seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Ekspektasi tersebut tidak wajar untuk dilakukan auditor, karena berdasarkan peraturan yang berlaku, tanggung jawab auditor hanya sampai memberikan opini atas laporan keuangan dengan tingkat keyakinan yang memadai bukan keyakinan sepenuhnya. Semakin tingginya ekspektasi yang tidak wajar kepada auditor mengenai tanggung jawab yang seharusnya dilakukan akan membuat kesenjangan persepsi audit semakin tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk membuat masyarakat memiliki persepsi yang lebih baik mengenai tanggung jawab auditor sehingga ekspektasi yang dimiliki oleh masyarakat masih berada dalam batas kewajaran.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diungkapkan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menginterpretasikan hasilnya. *Pertama*, penelitian ini hanya mengikutsertakan dua kelompok masyarakat yaitu pegawai negeri dan akademisi. Proporsi dari seluruh kelompok ini mungkin tidak secara akurat merefleksikan rasio atas jumlah masyarakat dalam kenyataannya. *Kedua*, penelitian ini menggunakan kuesioner yang memiliki ruang untuk terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh preferensi responden atas jawaban yang dipilihnya. *Ketiga*, penelitian ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor pemerintah sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan dan pernyataan badan profesional, sehingga penelitian ini sangat dibatasi pada tanggung jawab auditor menurut peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa perbedaan dengan standar akuntansi privat dalam perlakuannya.

Atas dasar keterbatasan tersebut, untuk penelitian yang akan datang dapat disarankan beberapa hal berikut. *Pertama*, menambahkan variabel penyebab terjadinya kesenjangan persepsi audit. *Kedua*, menggunakan responden yang memiliki kepentingan langsung dengan laporan keuangan pemerintahan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat, masyarakat yang memiliki investasi di pemerintah seperti pemilik Surat Utang Negara (SUN) atau Obligasi Ritel Indonesia, atau juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sering berperan sebagai pemerhati pelaksanaan pemerintahan. *Ketiga*, menggunakan metode penelitian uji beda *analysis of variance* untuk mendapatkan bukti empiris terjadinya kesenjangan persepsi audit di Indonesia dan melanjutkannya dengan uji regresi untuk menguji pengaruh instrumen penelitian tersebut terhadap kesenjangan persepsi audit. *Keempat*, menambah indikator-indikator untuk menyusun kuesioner sehingga bisa mengukur fenomena secara lebih akurat.

REFERENSI

Arens, A. dkk. 2012. *Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach 14th Edition*. New Jersey: Pearson Education, Inc.



- Azham, M.A. dkk. 2008. “*Practical Training And The Audit Expectations Gap: The Case Of Accounting Undergraduates Of Universiti Utara Malaysia*”. [On-Line]. Available at: <http://ssrn.com/abstract=1575602>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2007. “*Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*”.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. “*Warta BPK: Independensi, Integritas, Profesionalisme*”. Jakarta: Sekretariat Jenderal BPK RI
- Dewi, R.R. 2011. “*Expectation Gap Antara Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah dan Auditor Pemerintah: Studi Kasus di Pemerintah Propinsi Jawa Tengah*”. Skripsi pada Universitas Diponegoro, Semarang.
- Eriyanto, 2007. “*Teknik Sampling Analisis Opini Publik*”. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta
- Field, A. 2009. “*Discovering Statistics Using SPSS Third Edition (and sex and drugs and rock 'n' roll)*”. London: SAGE Publication Ltd.
- Ghozali, I. 2011. “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guy, D.M. & Sullivan, J.D. 1988. “*The Expectation Gap Auditing Standards*”*The Journal of Accountancy*. April.
- Hendriksen, E.S. & Van Breda, M.F. 1992. “*Accounting Theory: Fifth Edition*”. New York: McGraw-Hill Companies Inc.
- Hellriegel, D. & Slocum Jr., J.W. 2011. “*Organizational Behavior*”. Ohio: South-Western Cengage Learning.
- Humphrey, dkk. 1993. “*The Audit Expectation Gap in Britain: An Empirical Investigation*”. *Accounting and Business Research*, Vol 23 No. 91A.
- Hutabarat, J.A.S. & Yuyetta, E.N.A. 2012. “*Kesenjangan ekspektasi audit Berdasarkan Persepsi Auditor Inspektorat Dan Pemakai Laporannya (Studi Pada Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Gianyar)*”. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 1, No.1, 2013.
- Indrarto, M. 2008. “*Persepsi Pemakai Laporan Keuangan, Auditor, Akuntan Pendidik, dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Expectation Gap (Dalam Isu Auditor dan Proses Audit, Peran Auditor, Serta Kompetensi dan Independensi)*”. Skripsi pada Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.
- Jensen, M.C. & Smith, C.W. 1985. “*Stockholder, Manager, And Creditor Interests: Applications Of Agency Theory*”. [On-Line]. Available at: <http://papers.ssrn.com/abstract=173461>
- Koh, H. & Woo, E. 1998. “*The expectation gap in auditing*”. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 13, pp. 147-154.
- Messier, dkk. 2008. “*Auditing and Assurance Services, A Systematic Approach: Sixth Edition*”. New York: McGraw-Hill Companies Inc.
- Notoatmodjo. S. 2007. “*Metodologi Penelitian Kesehatan*”. Jakarta: Rineka Cipta.



- Okafor & Otor, J. 2012. "Narrowing the Expectation Gap in Auditing: The Role of the Auditing Profession". Journal of Finance and Accounting Vol.4, No.2, 2013
- Sekaran, U. 2011. "Metodologi Penelitian untuk Bisnis: Edisi 4, Terjemahan". Jakarta: Salemba Empat.
- Sikka, P. dkk. 2003. "The Impossibility of Eliminating The Expectations Gap: Some Theory and Evidence". Critical Perspective on Accounting, 9, 3, 299-334.
- Suatmaja, Y. 2004. "Persepsi Pemakai Laporan Keuangan, Auditor, dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Expectation Gap Dalam Isu Peran Auditor dan Aturan Serta Larangan Pada Kantor Akuntan Publik". Skripsi pada Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.
- Porter, B. 1993. "An Empirical Study of The Audit Expectation Gap-Performance Gap". Accounting Business Research, Vol. 24 (93): 49-68
- Porter, B. & Gowthorpe. C. 2004. "Audit Expectation-Performance Gap In The United Kingdom In 1999 And Comparison With The Gap In New Zealand In 1989 And In 1999". Edinburgh: The Institute of Chartered Accountants of Scotland.
- Ramdhani, Dudy S. 2012. "Persepsi Pemakai Laporan Keuangan dan Auditor Mengenai Expectation Gap: Studi Kasus Di Kota Semarang". Skripsi pada Universitas Diponegoro, Semarang.
- Robbins, S.P dan Judge, T.A. 2013. "Organizational Behavior: 15th Edition". New Jersey: Prentice Hall.
- Lesage, dkk. 2012. "Why are auditors blamed when an accounting fraud is unveiled? Experimental evidence".
- Tanzil, J. 2012. "Expectation Gap antara Auditor dengan Auditee". [On-Line]. Available at: <http://www.jtanzilco.com/main/index.php/accounting/507expectation%20gap>
- Winarna, J. & Rahmawati. 2001. "Peran Pengajaran Auditing Terhadap Pengurangan Gap Expectation Dalam Isu: Atribut Kinerja Auditor, Kepada Siapa Auditor Bertanggungjawab, dan Komunikasi Hasil Audit". Yogyakarta: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Edisi Desember 2003, 47-64.
- Yuliati, dkk. 2007. "Expectation Gap Antara Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah dan Auditor Pemerintah". Makassar: Simposium Nasional Akuntansi X. 26-28 Juli 2007